



Urai Antrean PBG, Pemkot Yogya Akselerasi Perizinan Lewat Bazar dan Unit Reaksi Cepat di MPP

YOGYA, TRIBUN - Pemkot Yogyakarta berupaya mengurai benang kusut fenomena keterlambatan dokumen Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang kerap dikeluhkan masyarakat. Guna mengakselerasi proses tersebut, eksekutif menggelar Bazar Perizinan dan Unit Reaksi Cepat Konsultasi PBG di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Yogyakarta.

Agenda yang diselenggarakan sepanjang 2-4 Juni 2026 ini, sekaligus menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Pemkot Yogyakarta.

Wali Kota Yogyakarta, Hasto Wardoyo, mengungkapkan, dokumen PBG menjadi jenis perizinan yang paling populer sekaligus menyumbang antrean paling banyak. Setelah ditelusuri, alur perizinan yang melibatkan lintas instansi, mulai

dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Dinas Pekerjaan Umum (DPU), hingga DPMPSTP, menjadi titik krusial terjadinya sumbatan.

"Titik sumbatannya itu seringkali ada di Dinas PU, karena di sana ada proses konsultasi dengan tim ahli secara teknis yang membuat lama. Maka dari itu, harus ada komunikasi dua arah yang cepat antara dinas dan pemohon," ujarnya, Selasa (2/6).

Hasto menegaskan, saat ini tercatat ada sekitar 900 berkas antrean Persetujuan Bangunan Gedung yang masuk ke dalam radar pembersihan atau cleaning. Kendati demikian, setelah ditapis ulang, tidak semua berkas tersebut murni bermasalah, karena beberapa di antaranya terregistrasi ganda dan berkas uji coba dari tahun-tahun sebelumnya.

"Dari 900 itu, sebetulnya ada

sekitar 300 berkas yang sudah selesai tapi tertahan karena menunggu tim penilai. Aturan tahun 2024, penilai ini tidak diperlukan, tapi sekarang wajib ada. Saya akan paksakan para penilai bekerja lebih cepat agar 300 berkas ini bisa langsung keluar," tegasnya.

Melalui momentum bazar tersebut, Pemkot Yogyakarta menargetkan sisa 900 berkas sisa rampung seluruhnya di sepanjang tahun 2026. Ia pun menyampaikan, pada hari pertama pelaksanaan bazar, hingga pukul 12.30 WIB, tercatat sudah ada 110 pemohon yang datang mengakses layanan.

"Jika masyarakat sudah paham dan seluruh persyaratan dokumen yang dibawa lengkap tanpa ada masalah, komitmen saya prosesnya harus bisa selesai dalam 35 hari kerja," im-

buhnya.

Sementara, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Yogyakarta, Budi Santosa, menjelaskan, kendala utama yang dihadapi masyarakat selama ini adalah pengurusan dokumen yang bersifat parsial. Mengingat PBG bersifat kumulatif, pemohon harus merampungkan urusan tata ruang, lingkungan, Amdalalin, pemadam kebakaran, hingga rekomendasi kebudayaan secara terpisah.

"Melalui bazar selama tiga hari ini, semua instansi terkait kami satukan. Jadi masyarakat tidak perlu bingung lagi melompati dinas satu per satu. Komposisi pemohon sejauh ini berimbang, fifty-fifty antara hunian tempat tinggal dan tempat usaha," urainya.

Ia menyebut, animo masyarakat mengakses bazar cende-

rung tinggi, di mana pada hari pertama angkanya melonjak menjadi 110 orang dari rata-rata harian yang biasanya hanya 80-90 orang.

Oleh sebab itu, Budi pun membuka peluang besar untuk mengadopsi formula bazar ini menjadi Standar Operasional Prosedur (SOP) rutin setiap harinya.

"Sangat dimungkinkan formula bazar terpadu lintas OPD seperti ini kami terapkan dalam jangka panjang, bahkan menjadi SOP harian di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta," terangnya.

"Ada enam layanan utama beserta turunannya yang kami maksimalkan di sini, mulai dari konsultasi PBG, perizinan berusaha, lingkungan, Amdalalin, pemadam kebakaran, hingga kebudayaan," pungkask Budi.

(aka/ord)



SERAHKAN BERKAS - Wali Kota Hasto Wardoyo menyerahkan berkas PBG kepada salah satu warga di sela agenda Bazar Perizinan dan Unit Reaksi Cepat Konsultasi, di Mal Pelayanan Publik Kota Yogyakarta, Selasa (2/6).

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P			

Yogyakarta, 05 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005